

---

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI****Oleh****Helen Irawati Taileleu<sup>1</sup>, Suklimah Ratih<sup>2</sup>****<sup>1,2</sup> Universitas Widya Kartika****E-mail: <sup>1</sup>[helenirawati24@gmail.com](mailto:helenirawati24@gmail.com), <sup>2</sup>[ratihratih177@gmail.com](mailto:ratihratih177@gmail.com)**

---

**Article History:***Received: 21-07-2023**Revised: 30-07-2023**Accepted: 24-08-2023***Keywords:***Akuntansi**Pertanggungjawaban,  
Anggaran Pendapatan  
Belanja Daerah, Badan  
Keuangan Daerah.*

**Abstract:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan untuk mengetahui kesesuaian biaya anggaran realisasi yang dikeluarkan dalam setiap periode akuntansi dengan biaya yang di anggarkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, subjek dalam penelitian ini Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. dengan mengambil 3 informan yakni kepala Kantor Badan Keuangan Daerah Mentawai Kasubid Perencanaan dan Pendapatan Serta Kasubid Akuntansi Pelaporan Pendapatan. Sumber data adalah data primer data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam melaksanakan penganggaran dan realisasi laporan dibuat oleh masing-masing Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) berupa laporan pertanggungjawaban kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara umum penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengevaluasi kinerja masing-masing unit sudah efektif.

---

**PENDAHULUAN**

Pengertian dari judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Analisis adalah penyelidikan tahap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penerapan adalah proses cara pembuatan menerapkan penggunaan, dan mempraktikkan. Akuntansi adalah sistem pelaporan yang memberikan laporan kepada pemangku kepentingan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi kerja. Pertanggungjawaban adalah tanggungjawab pimpinan atas kegiatan yang dilakukan di instansi. Badan Keuangan Daerah adalah lembaga pendukung pemerintah yang merupakan otoritas yang berwenang di setiap daerah pemerintah. Pulau Mentawai sendiri ber Provinsi di Sumatera Barat, Indonesia.

Kabupaten yang terletak diluar Pulau Sumatera ini terdiri dari empat Pulau utama. Kabupaten Kepulauan Mentawai di bentuk berdasarkan UU RI No. 49 Tahun 1999, dan dinamai berdasarkan asal Geografisnya. Yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada Pulau Sipora yang bertepatan di Km.09 Sipora Utara. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan daerah memelihara kepemilikan daerah dan mengelolah pendapatan daerah serta dapat melakukan pengelolaan pendapatan keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan efisiensi ekonomi, transparansi dan akuntabilitas untuk rasa keadilan dan kepatuhan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mantawai pada parktik masih ditemui kelemahan perencanaan pelaksanaan pada penyusunan dan pembahasan anggaran hingga akhir tahun, format rencana pendapatan dan pengeluaran. Lembaga keuangan daerah saat ini masih memerlukan penelitian terutama dalam hal pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya pelayanan publik.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan tentang kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. *American Accounting Association* mendefenisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan pelapor informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas daan tegas bagi mereka yang melakukan informasi tersebut. Dapat diketahui akuntansi dapat dianggap sebagai analisis data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam keputusan ekonomi dan perusahaan. Menurut pendapat Charles T. Horngren dan George Foster akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur kinerja bisnis, mengelolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Jadi akuntansi adalah sesuatu yang mengukur bisnis dari mulai penggolongan transaksi dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, kemudian setelah itu akan diambil sebuah keputusan dari laporan tersebut.

Berdasarkan pengertian mengenai akuntansi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan akuntansi: akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
- b. Kegunaan akuntansi: informasi yang hasilkan harus berguna untuk evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai unit bisnis yang relevan.

### 2. Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Syarat dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan adalah suatu organisasi yang terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban dan memiliki hirarki yaitu suatu organisasi yang pengambilan keputusannya tidak terbatas pada beberapa manajer saja saja tetapi meluas ke seluruh organisasi. Menurut Garrison, Noreen, dan Brewer (2013), organisasi yang dibagi dalam pusat pertanggungjawaban merupakan syarat

untuk melakukan akuntansi pertanggungjawaban, karena struktur organisasi merupakan acuan untuk mencapai tujuan organisasi sistem akuntansi ini. Di setiap pusat pertanggungjawaban, setiap departemen menyusun anggaran dengan mempertimbangkan misi perusahaan secara keseluruhan. Ada lima syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi 2010) pusat biaya yang memadai sebagai berikut:

1. Struktur organisasi, yang menetapkan secara tegas kedaulatan dan tanggungjawab tiap strata manajemen.
2. Anggaran, biaya yang disusun bagi tiap strata manajemen.
3. Penggolongan biaya, sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam suatu organisasi
4. Sistem akuntansi biaya, yang disesuaikan dengan struktur organisasi
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab (responsibility reporting).

Drs. Abdul Halim (1999), berpendapat bahwa tujuan akhir dari akuntansi biaya adalah memberikan informasi biaya kepada manajemen untuk membantu mereka mengelola perusahaan atau departemennya. Penetapan biaya yang akurat membantu menentukan biaya yang tepat dari suatu produk. Pengklasifikasian biaya yang benar adalah dengan menggunakan konsep “biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda”, yang berarti bahwa biaya diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaan data biaya tersebut.

### 3. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*) digunakan untuk setiap bagian organisasi yang bertanggung jawab atas biaya, laba dan investasi.

Menurut Garisson Noreen Brewer (2013), terdapat tiga jenis pusat pertanggungjawaban yaitu :

1. Pusat biaya (*cost center*) yang mengendalikan pengeluaran seperti akuntansi, keuangan, manajemen umum, dan sumber daya manusia sering dianggap sebagai pusat biaya. Manajer pusat biaya diharapkan untuk meminimalkan biaya dan memberikan layanan atau produk yang dibutuhkan oleh bagian lain dari organisasi.
2. Pusat laba (*profit center*) mengendalikan biaya dan pendapatan. Seperti manajer pusat biaya, manajer pusat laba tidak memiliki kendali atas dana investasi. Manajer pusat laba sering dinilai dengan membandingkan laba aktual dengan target atau laba yang dianggarkan
3. Pusat investasi (*investment center*) mengendalikan pendapatan dan pengeluaran investasi aset operasi.

### 4. Jenis - Jenis Pusat Petanggungjawaban

Menurut Mulyadi (2005), Pusat Pertanggungjawaban unit organisasi didalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum aktivitas setiap pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan adalah mengubah input menjadi output. Jika input dari pusat pertanggungjawaban dikalikan dengan harga maka akan diperoleh biaya, sebaliknya jika output dikalikan dengan harga maka akan diperoleh pusat pertanggungjawaban. Namun, tidak semua keluaran pusat akuntabilitas dapat diukur secara kuantitatif. Atas dasar masukan dan keluaran, pusat

pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Pusat biaya (*expencc center*) adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajemennya diukur berdasarkan masukannya.
2. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya.
3. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara kekurangan dan masukan (laba).
4. Pusat investasi adalah pusat tanggung jawab di mana kinerja manajer diukur dengan membandingkan pengembalian yang diperoleh dengan berinvestasi di pusat tanggung jawab.

### 5. Tipe Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Safira (2018), jika suatu perusahaan atau instansi ingin mendirikan organisasi yang berpusat pada tanggungjawaban, maka ada beberapa tipe yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya pembagian tugas tanggungjawab yang jelas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban maupun dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri
- b. Adanya pelimpahan wewenang yang jelas kepada pimpinan pusat pertanggungjawaban
- c. Manajer atau pimpinan pusat pertanggungjawaban harus mengawasi biaya – biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dengan memperhatikan kondisi objektif lapangan tanpa ada manipulasi apapun. Pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses berpikir terkait dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan selalu menggunakan karya ilmiah.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Analisis laporan pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## Jenis dan Sumber Data

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, pengembangan teori dan gambaran praktis penerapan akuntansi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data kualitatif juga memuat gambaran tentang kantor-kantor yang diteliti.

### Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer, dimana peneliti langsung mengumpulkan data yang diperoleh dari orang pertama.

### Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi lapangan dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih jelas.

1. Wawancara  
Teknik pengumpulan datanya melalui proses wawancara lisan satu arah dan dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden kemudian tanggapan responden dicatat.
2. Dokumentasi  
Dokumentasi dikumpulkan dengan cara mengambil gambar langsung pada kantor badan keuangan daerah kabupaten kepulauan mentawai.

### Langkah-Langkah Pembahasan

Langkah-langkah dari pembahasan ini adalah:

1. Analisis struktur organisasi kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara jelas dan tegas untuk mengetahui wewenang dan tanggungjawab tiap divisi
2. Analisis anggaran Tahun 2021 pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Analisis pelaksanaan APBD oleh kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Tahap konsolidasi pelaksanaan APBD oleh kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021
5. Pembuatan laporan Akuntansi Pertanggungjawaban
6. Pembahasan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan peraturan daerah kantor Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan yang dipimpin oleh kepala badan terafiliasi dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Menurut Peraturan Otorita Kepulauan Mentawai No. 14 Tahun 2013, tertanggal 19 Februari 2013, Otorita Kepulauan Mentawai memiliki 10 kecamatan, 43 dusun dan desa menjadi 354 desa, yaitu:

**Tabel 4.1 Uraian masing-masing tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
1.	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2.	Sikakap	Taikako	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	48
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6.	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	36
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	30
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	33
9.	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi	3	29
Jumlah			43	354

Sumber: Data BPS (Hal 226)

**Tabel 4.4 Laporan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 (Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Anggaran	Raelisasi	Varians (%)
1.	<b>PENDAPATAN -LRA</b>	<b>869.799.014.618.00</b>	<b>830.153.085.297.37</b>	<b>95,88</b> <b>4,12</b>
2.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA</b>	<b>45.340.441.160.00</b>	<b>31.638.013.029.37</b>	<b>69,78</b> <b>30,22</b>
3.	Penetapan pajak daerah -LRA	7661.649.285.00	3.860.497.217.00	50,39    49,61
4.	Pendapatan restribusi daerah -LRA	8.976.710.358.00	3.033.172.965.00	33,79    66,21
5.	Pendapatan hasil pengelolaan kekeayaan daerah yang dipisahkan -LRA	10.684.123.854.00	10.684.123.854.00	100,00    0,00
6.	Lain-lain PAD yang sah LRA	18.017.957.663.00	14.060.219.003.37	78,03    21,97
7.	<b>PENDAPATAN TRANSFER -LRA</b>	<b>795.905.338.458.00</b>	<b>775.266.457.268.00</b>	<b>97,41</b> <b>2,59</b>
8.	Pendapatan transfer pemerintah pusat LRA	755.604.196.205.00	742.958.193.981.00	98,33    1,67
9.	Pendapatan transfer pemerintah antar daerah -LRA	40.301.142.253.00	32.308.263.287.00	80,17    19,83
10.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LRA</b>	<b>24.553.235.000.00</b>	<b>23.248.615.000.00</b>	<b>94,69</b> <b>5,31</b>
11.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.553.235.000.00	23.248.615.00	94,69    5,31
12.	<b>BELANJA</b>	<b>907.054.073.744.00</b>	<b>829.394.144.601.02</b>	<b>91,44</b> <b>8,56</b>
13.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>594.317.753.544.00</b>	<b>544.000.215.852.02</b>	<b>91,53</b> <b>8,47</b>
14.	Belanja pegawai	293.257.908.438.00	284.566.995.633.00	97,04    2,96
15.	Belanja barang dan jasa	283.526.877.106.00	243.479.793.619.02	85,88    14,12
16.	Belanja subsidi	10.550.000.000.00	9.585.794.613.00	90,86    9,14
17.	Belanja hibah	6.012.328.000.00	5.491.419.256.00	91,34    8,66
18.	Belanja bantuan sosial	970.640.000.00	876.212.731.00	90,27    9,73
19.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>190.832.037.953.00</b>	<b>164.639.582.130.00</b>	<b>86,27</b> <b>13,73</b>
20.	Belanja modal tanah	0.00	0.00	0,00    100,00
21.	Belanja modal peralatan dan mesin	29.569.593.220.00	25.876.770.459.00	87,51    12,49
22.	Belanja modal gedung dan bangunan	28.879.361.653.00	21.708.856.761.00	75,17    24,83
23.	Belanja modal jalan irigasi dan jaringan	131.490.757.080.00	115.471.089.584.00	87,82    12,18
24.	Belanja modal aset tetap lainnya	892.326.000.00	1.582.865.326.00	177,39    -77,39
25.	<b>BELANJA TAKTERDUGA</b>	<b>2.114.665.260.00</b>	<b>1.587.597.109.00</b>	<b>75,08</b> <b>0,92</b>
26.	Belanja takterduga	2.144.665.260.00	1.587.597.109.00	75,08    0,92
27.	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>119.789.616.957.00</b>	<b>119.166.749.510.00</b>	<b>99,48</b> <b>0,52</b>
28.	Belanja bagi hasil	2.506.385.687.00	2.446.929.619.00	97,63    2,37
29.	Belanja bantuan keuangan	117.283.231.300.00	116.719.819.891.00	99,52    0,48
30.	Surplus / defisit	41.255.059.126.00	758.940.696.35	1,84    101,84

Sumber: Data Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 (diolah)

Rumus yang digunakan untuk mengukur efesien biaya adalah sebagai berikut:

**Ket:**

Realisasi =  $\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$

Anggaran Biaya

Varian =  $\frac{\text{Anggaran Biaya} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$

Anggaran Biaya

---

**Atau**

Rupiah = Realisasi Biaya – Anggaran Biaya

**Analisis dan Pembahasannya****Pendapatan**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD-LRA) pada APBD 2021 adalah Rp. 45.340.441.160,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 31.638.013029,37 sehingga terdapat nilai presentase 69,79% dengan varian 30,22%. Oleh karena itu semakin besar variansnya semakin luas nilai rata-ratanya Selisih ini tidak menguntungkan karena dari tabel terlihat selisih target penyelesaian pendapatan sebesar 93,20%. Dilihat dari pendapatan alokasi daerah, terealisasi 33,79%, diikuti penerimaan pajak daerah 50,39% dan pendapatan awal daerah lainnya 78,03%. Pasalnya, adanya wabah pandemi Covid-19 telah menghambat aktivitas pembangunan dan perekonomian masyarakat. seperti di sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah Kepulauan Mentawai karena adanya social distancing dan pembatasan skala besar (PSBB), bahkan negara-negara di dunia juga ikut lockdown sehingga mengurangi jumlah wisatawan. di daerah dan wisatawan dari luar negeri.
2. Pendapatan Transfer LRA, dengan anggaran Rp. 795.905.338.458.00, sedangkan realisasinya Rp.775.266457268,00, sehingga terdapat nilai presentase 97,41% dengan varian 2,59%. Target yang dianggarkan tahun anggaran 2021 tersebut lebih tinggi Rp.79.137.769.123,00 atau naik 11,04%. perbedaan pendapatan tidak menguntungkan. dapat dilihat dari nilai persentase anggaran yang dilaksanakan. Masalah perbedaan ini adalah bahwa sebenarnya transfer pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat sedang tidak baik. Penyertaan dana melebihi target anggaran.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp.23.248.615.000,00 atau 94,69% dan mendapatkan nilai varian 5,31%, dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.553.235.000,00. Pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan dari Dana Bos. Pendapatan Hibah Dana Bos adalah program pemerintah untuk mendanai biaya operasional lembaga pendidikan inti non-pegawai sebagai penyelenggara wajib belajar. Penyaluran prestasi diberikan kepada 127 Sekolah Dasar Negeri (SD) dengan capaian dana BOS sebesar Rp16.183.336.000,00 dan 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan Rp7.065.279.000,00 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyebaran ini tidak menguntungkan karena realisasi sumber pendapatan lain yang sah di daerah belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2021. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang, pemerintah Kepulauan Mentawai harus berhati-hati dalam mengidentifikasi setiap objek. penghasilan sah lainnya.

**Belanja**

1. Belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp. 544.000.215.852,02 atau 89,08% dari anggaran sebesar Rp.594.317753.544,00 dengan varian 8,47%. Selisih ini menguntungkan karena tidak ada tambahan biaya personalia untuk dana Bos dibandingkan tahun lalu.
2. Belanja Modal dengan anggaran Rp. 190.832.037.953,00 sedangkan realisasi Rp.164.639.582.130.00. sehingga terdapat nilai presentase 86,27% dengan varian

13,73%. Selisih ini menguntungkan Selisih tersebut memiliki laba aktual lebih rendah dari anggaran. Melalui tabel di atas terlihat bahwa setiap item telah disesuaikan anggarannya, investasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset tetap lainnya yang mendatangkan manfaat lebih dari satu periode/tahun. sebenarnya jika dilihat dari total nilai belanja modal, ada Rp 207.706.486,00 termasuk belanja modal dari JKN/FKTP.

3. Belanja tak terduga dengan anggaran Rp. 2.114.665.260.00 dengan realisasi Rp. 1.587.597.109,00. Sehingga nilai presentase 75,08% dengan varian 26,34%. Belanja tidak terduga tahun 2021 digunakan untuk kegiatan operasi dan untuk pemeliharaan Breakwater/Seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya pekerjaan rehabilitas bangunan bantuan pengamanan pantai pastoran Desa Sikapak senilai Rp.676.820.000,00, bantuan bangunan bencana bagi masyarakat sebesar Rp.255.000.000,00 Biaya adm penutupan rekening tabungan Dorman/Fasit sebesar Rp.586.365,00 penyeteroran sisa dana desa tahun 2015-2019 sebesar Rp.455.190.744,00 dan pengembangan belanja dana hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI), Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebesar Rp.200.000,00 Pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian SP2D.
4. Belanja modal aset tetap lainnya dengan anggaran Rp.892,326.000,00 dengan realisasi Rp. 1.582.865.326,00 dengan nilai presentase 117,39% sehingga mendapat nilai varian - 77,9%. Selisih ini cukup merugikan karena jumlah yang terealisasi lebih tinggi dari anggaran yang diharapkan. Biarkan perbandingannya cukup tinggi dan mengarah ke varian dengan poin minus dan harus menghormati pelaksanaan dengan anggaran yang direncanakan.
5. Belanja Transfer dengan anggaran Rp. 119.789.616.957.00 dengan realisasi Rp. 119.166.749.510,00 dengan presentase 99,48% sehingga memperoleh varian 0,52. selisih ini cukup menguntungkan karena anggran lebih besar dibanding realisasi. Dan dapat dilihat dari nilai presentase jumlah yang terealisasi sehingga memperoleh selisih antara target dengan realisasi anggaran dengan nilai yang signifikan. Selisih ini terjadi karena sedikitnya realisasi.

### Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun anggaran tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**TABEL 4.12 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
2.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LRA</b>			
3.	Pendapatan pajak daerah LRA	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	50,39
4.	Pendapatan restribusi daerag -LRA	8.976.710.357,00	3.033.172955,00	33,79
5.	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	100,00

	LRA			
6.	Lain-lain PAD yang sah LRA	18.017.957.663,00	14.060.219.003,37	78,03
7.	<b>Jumlah pendapatan asli daerah</b>	<b>45.340.441.160,00</b>	<b>31.638.013.029,37</b>	<b>69,78</b>
8.	<b>PENDAPATAN TRANSFER -LRA</b>			
9.	Pendapatan transfer pemerintah pusat -LRA	755.604.196.205,00	742.958.193.981,00	98,33
10.	Pendapatan transfer pemerintah antar desa -LRA	40.301.142.253,00	32.308.263.287,00	80,17
11.	<b>Jumlah pendapatan transfer</b>	<b>795.905.338.000,00</b>	<b>775.266.457.268,00</b>	<b>97,41</b>
12.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LRA</b>			
13.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	24.553.235.000,00	23.248.615.000,00	94,69
14.	<b>Jumlah pendapatan lain-lain yang sah</b>	<b>24.553.235.000,00</b>	<b>23.248.615.000,00</b>	<b>94,69</b>
15.	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>865.799.014.618,00</b>	<b>830.153.085.297,37</b>	<b>95,88</b>
16.	BELANJA			
17.	<b>BELANJA OPERASI</b>			
18.	Belanja pegawai	293.257.908.438,00	284.566.995.633,00	97,04
19.	Belanja barang dan jasa	283.526.877.106,00	243.479.793.619,02	83,88
20.	Belanja subsidi	10.550.000.000,00	9.585.794.613,00	90,86
21.	Belanja hubah	6.012.328.000,00	5.491.419.256,00	91,34
22.	Belanja bantuan sosial	970.640.000,00	876.212.731,00	90,27
23.	<b>Jumlah Belanja Operasional</b>	<b>594.317.753.544,00</b>	<b>544.000.215.852,02</b>	<b>91,53</b>
24.	<b>BELANJA MODAL</b>			
25.	Belanja modal tanah	0,00	0,00	
26.	Belanja modal peralatan dan mesin	29.569.593.220,00	25876.770.459,00	87,51
27.	Belanja modal gedung dan bangunan	28.879.361.653,00	21.708.856.761,00	75,17
28.	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	131.490.757.080,00	115.471.089.584,00	87,82
29.	Belanja modal aset tetap lainnya	892.326.000,00	1.582.865.326,00	177,39
30.	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>190.832.037.953,00</b>	<b>164.639.582.130,00</b>	<b>86,27</b>
31.	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
32.	Belanja takterduga	2.114.665.260,00	1.587.109,00	75,08
33.	<b>Jumlah Belanja Takterduga</b>	<b>2.114.665.260,00</b>	<b>1.587.109,00</b>	<b>75,08</b>
34.	<b>Jumlah belanja transfer</b>	<b>787.264.456.757,00</b>	<b>710.227.395.091,02</b>	<b>90,21</b>
35.	<b>Belanja Transfer</b>			
36.	Belanja bagi hasil	2.506.385.687,00	2.446.929.619,00	97,63
37.	Belanja bantuan keuangan	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	99,52
38.	<b>Jumlah Transfer</b>	<b>119.789.616.987,00</b>	<b>119.166.749.510,00</b>	<b>99,48</b>
39.	<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>907.054.075.744,00</b>	<b>892.394.144.601,02</b>	<b>91,44</b>
40.	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(41.255.059.126,00)</b>	<b>758.940.696,35</b>	<b>-1,84</b>

Sumber: BKD Mentawai (*diolah*)

**Pembahasan Pembiayaan**

1. Jumlah pendapatan asli daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja pembiayaan tahun anggaran 2021 terrealisasi sebesar Rp.31.638.013.029,37 atau 69,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.340.441.160,00. Selisih ini tidak menguntungkan karena dari tabel tersebut dapat diketahui selisih anggaran realisasi pendapatan yang ditargetkan adalah 93,20%. Dilihat pada pendapatan redistribusi daerah terrealisasi 33,79%, diikuti dengan pendapatan pajak daerah 50,39%, dan lain-lain pendapatan asli daerah 78,03%. Hal ini disebabkan karena Adanya wabah pandemi Covid -19 yang mengakibatkan terhambat nya kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
2. Jumlah pendapatan transfer menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja pembiayaan tahun anggaran 2021 terrealisasi sebesar Rp.775.266.457.268,00 atau 97,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.795.905.338.458,00. selisih tidak menguntungkan, dapat dilihat dari nilai presentase jumlah anggaran yang terealisasi. Masalah dari selisih ini karena pendapatan realisasi transfer pemerintah pusat mengalami masalah dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana bagi hasil tersebut melebihi target yang dianggarkan.
3. Ralisasi penghasilan lain-lain Pendapatan yang efektif tahun anggaran 2021 sebesar Rp.23.248.615.000,00 atau 94,69% dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 24.553.235.000,00. Selisih ini terjadi karena adanya realisasi dana Bos pada sekola Dasar (SD) sebesar Rp.16.183.336.000,00 dan realisasi penyaluran dana pada SMP dilingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan mentawai sebesar Rp. 7.065.279.000,00, selisish ini tidak menguntungkan karena belum mencapai target anggaran yang disediakan.
4. Jumlah belanja Operasional menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja pembiayaan terrealisasi sebesar Rp.544.000.215.852,02 atau dengan presentase 91,51%, dengan anggaran sebsesar Rp.594.317.553.544,00. %. Selisih ini menguntungkan karena tidak ada penambahan belanja pegawai dari dana Bos.
5. Jumlah belanja Modal terrealisasi sebesar Rp.164.639.582.130,00 atau 86,27% dengan anggaran sebesar Rp.190.832.037.953,00, Selisih ini terjadi karena belanja modal aset tetap lainnya lebih besar realisasi dibanding anggaran hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja modal aset tidak berwujud antara lain belanja modal software realisasi sebesar Rp. 351.583.000,00 dan anggaran sebsar Rp. 352.380.000,00.
6. Jumlah belanja tak terduga terrealisasi sebesar Rp. 1.587.109,00 atau 75,08% dengan anggaran sebesar Rp.2.114.665.260,00, belanja takterduga ini tidak menguntungkan karena mengalami penurunan, selisish ini terjadi karena disebabkan alokasi belanja tak terduga tahun sebelumnya diperuntukkan untuk belanja penanganan Covid-19.dan untuk tahun ini sudah dialikan kepada belanja pada kegiatan masing-masing OPD.
7. Jumlah Belanja dan Transfer dengan realisasi sebesar Rp.892.394.144.601,02 atau 91,44% dengan anggaran sebesar Rp.907.054.075.744,00. Selisih ini menguntungkan karena setiap belanja yang direalisasikan lebih kecil dari anggaran.
8. Surplus/defisist dengan realisasi sebesar Rp.758.940.696,35 dengan presentase -1,84% dengan anggaran sebesar Rp.41.255.059.126,00. Selisish ini menguntungkan karena

---

anggaran lebih besar dari realisasi, selisih ini disebut surplus, dimana kondisi keuangan daerah berlebih atau membaik.

### **Pembahasan**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah bagian dari sistem pengendalian manajemen di mana manajer kantor mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka. Akuntansi pertanggungjawaban juga menekankan sistem pemantauan yang bertanggung jawab atas hasil kerja yang dicapai dan menentukan tindakan korektif yang harus diambil atas penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan kantor. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa setiap laporan pertanggungjawaban telah diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian anggaran memerlukan sistem akuntansi yang akuntabel. Setiap pusat tanggung jawab selalu menetapkan target operasi untuk dana anggaran, membandingkan anggaran aktual dan anggaran untuk menentukan apakah biaya sedang berlangsung. Di sisi lain, ini dapat digunakan untuk menentukan apakah itu hemat biaya untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kantor Keuangan Daerah sebagai salah satu instansi pemerintahan di Kepulauan Mentawai sudah sangat efisien dalam pembagian kerja. Akuntansi pertanggungjawaban bertindak sebagai alat pengendalian biaya dengan mengasosiasikan biaya dengan pihak yang dikeluarkan atau diperoleh biaya tersebut oleh manajer yang bertanggung jawab atas pihak tersebut. Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban dapat dijelaskan bahwa pengendalian biaya pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai efektif karena mengalami margin keuntungan ketika kinerja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini lebih lanjut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Laporan Pertanggungjawaban Kantor Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai telah selesai, namun pada kenyataannya masih abu-abu. Yang bisa terjadi adalah biaya aktual sama dengan perkiraan biaya.

Mandak (2013) mengemukakan alasan ketidak pastian karena perubahan situasi dan kondisi. Namun, laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan dalam bentuk laporan kinerja yang dianggarkan sudah cukup untuk pemantauan kinerja yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sudah sesuai dengan visi dari Kantor Badan Keuangan Daerah. Mengelola keuangan daerah, Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai telah melaksanakan pengelolaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan objektif. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pusat pertanggungjawaban berada pada Kepala Badan Keuangan Daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan dan mengendalikan biaya. Melalui laporan penjelasan pelaksanaan anggaran, kepala Badan Keuangan Daerah dapat menilai kinerja dengan membandingkan anggaran yang diharapkan dengan hasil pelaksanaan anggaran. Penetapan standar kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai di atur dengan aturan baku.

**KESIMPULAN**

Dari analisis di atas, peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari struktur organisasi terlihat jelas pembagian tugas masing-masing departemen di kantor per fungsi. Namun pelaksanaan struktur organisasi belum jelas, dan sebagian angkatan kerja masih menganggap remeh pelaksanaan fungsinya.
2. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sangat efektif dalam menyusun laporan.
3. Melakukan pembukuan Pertanggungjawaban di kantor “Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai” sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
4. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada kantor Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sehingga penyimpangan terhadap biaya dapat dicegah. Hal ini dapat dilihat dari Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mentawai dapat dilihat pada kejelasan struktur organisasi, adanya laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran, dan Pusat pertanggungjawaban yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Charles T. Horngren. Akuntansi Biaya. Edisi ke enam jilid 1. Erlangga, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- [2] Garisson Noreen Brewar (2013) Akuntansi Manajerial. Edisi ke -14 buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Abdul H. (1999). Dasar-Dasar Akuntansi Biaya. Edisi ke Empat. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA
- [4] Garisson Noreen Brewar (2013) Akuntansi Manajerial. Edisi ke -14 buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- [5] Mulyadi .2005 *Akuntansi Biaya. Edisi 5*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [6] Safira, 2018. *Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban* (2023). Available at: <https://123dok.com/article/syarat-syarat-akuntansi-pertanggungjawaban.zgw48pr2> (Accessed: 21 August 2023).
- [7] Perda No 2 Tahun 2022. Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.